*Jurnal SMaRT* Volume 10 Nomor 02 Desember 2024
DOI: https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2481

# Kosmopolitanisme Vernakular: Respon Indonesia terhadap Konflik Rohingya di Myanmar

## Vernacular Cosmopolitanism: Indonesia's Response to the Rohingya Conflict in Myanmar

**Endang Susanti**[1] dan **Hamdani**[2]

[1]Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
santisu864@gmail.com
[2]Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia
hamdani@uinjkt.ac.id

Artikel Disubmit : 14 Oktober 2024
Artikel Direvisi : 29 November 2024
Artikel Disetujui : 27 Desember 2024

***ABSTRACT***

*The Rohingya conflict in Myanmar is one of the conflicts that has attracted global attention and triggered responses from various countries, including Indonesia. As a country with the largest Muslim population and a high commitment to humanitarian principles, Indonesia has a strategic position in responding to the Rohingya conflict in Myanmar. This study aims to analyze vernacular cosmopolitanism in understanding the reality of the conflict that occurred in Southeast Asia, especially in how Indonesia responded to the Rohingya ethnic conflict in Myanmar. This study uses qualitative methods with literature analysis and case studies to analyze how vernacular cosmopolitanism, which includes universal Islamic values, can be interpreted locally to ground peace, tolerance, and justice in resolving complex conflicts. This study uses the concept of vernacular cosmopolitanism as presented by Pnina Werbner to analyze Indonesia's response to the Rohingya conflict in Myanmar. This study presents evidence that the concept of vernacular cosmopolitanism is practiced by Indonesia in responding to the Rohingya conflict in Myanmar. The values of openness, tolerance and responsibility towards fellow human beings are manifested in the provision of humanitarian assistance and acceptance of Rohingya refugees. In addition, Indonesia also acts as a mediator and facilitator in resolving conflicts using regional diplomacy based on consensus. Indonesia also uses religious diplomacy by facilitating interfaith dialogue to promote tolerance and peace. All that Indonesia does is solely out of concern for fellow human beings and to realize world peace.*

***Keywords**: Conflict; Openness; Responsibility; Tolerance; Vernacular Cosmopolitanism*

***ABSTRAK***

*Konflik Rohingya di Myanmar merupakan salah satu konflik yang telah menarik perhatian global dan memicu respon dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dan memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan, Indonesia memiliki posisi strategis dalam merespon konflik Rohingya di Myanmar. Penelitian ini bertujuan menganalisis kosmopolitanisme vernakular dalam memahami realitas konflik yang terjadi di Asia Tenggara, khususnya pada bagaimana Indonesia merespon konflik etnis Rohingya di Myanmar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis literatur dan studi kasus untuk menganalisis bagaimana kosmopolitanisme vernakular, yang mencakup nilai-nilai universal Islam dapat diinterpretasikan secara lokal untuk membumikan perdamaian, toleransi, dan keadilan dalam penyelesaian konflik yang kompleks. Penelitian ini menggunakan konsep kosmopolitanisme vernakular dari Pnina Werbner untuk menganalisis respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar. Dalam penelitian ini dihasilkan fakta bahwa konsep kosmopolitanisme vernakular dipraktikkan Indonesia dalam menanggapi konflik Rohingya di Myanmar. Nilai-nilai keterbukaan, toleransi dan tanggungjawab terhadap sesama manusia diwujudkan dalam pemberian bantuan kemanusiaan dan penerimaan terhadap pengungsi Rohingya. Selain itu, Indonesia juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian konflik menggunakan diplomasi regional berbasis musyawarah mufakat. Indonesia juga menggunakan diplomasi agama dengan memfasilitasi dialog antaragama untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Semua yang dilakukan oleh Indonesia tersebut semata-mata karena wujud keperdulian terhadap sesama manusia serta untuk mewujudkan perdamaian dunia.*

***Kata Kunci**: Keterbukaan; Konflik; Kosmopolitanisme Vernakular; Tanggung Jawab; Toleransi*

## PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan pada abad ke-21 menjadi sebuah permasalahan yang sering terjadi di Asia Tenggara bahkan di belahan dunia, hak-hak individu banyak dilanggar, diciderai maupun tidak dipenuhi (Ajawaila, Matulapelwa, and Ngongare 2022: 131). Krisis kemanusiaan ini ditandai dengan mulai hilangnya hak-hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan berdasarkan kebutuhannya, hak untuk memperoleh rasa aman, hak berpendapat, hak memilih agama, dan hak-hak dasar lainnya. Adapun penyebab dari krisis kemanusiaan ini karena adanya rasa tidak terima terhadap suatu

DOI: https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2481

perbedaan yang terjadi di lingkungannya baik itu dalam hal agama, ras, etnis, suku, warna kulit maupun lainnya. Perbedaan tersebutlah yang menjadi awal mula adanya perselisihan baik itu antar individu, kelompok kecil maupun kelompok besar.

Dewasa ini banyak terjadi konflik yang disebabkan karena perbedaan etnis dan agama. Etnis maupun agama menjadi suatu hal yang sensitif bagi beberapa orang mengingat hal tersebut merupakan bagian integral dari identitas pribadi maupun kelompok. Identitas inilah yang dijadikan sebagai ciri khas atau pembeda seseorang atau suatu kelompok, akan tetapi seharusnya identitas yang beragam tersebut menjadi suatu keberagaman bukan menjadi suatu perbedaan (Adi 2020: 3). Sensitivitas yang melekat pada identitas etnis maupun agama tersebut menjadikan suatu hal yang penting bagi masyarakat maupun pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap isu-isu terkait.

Asia Tenggara sebagai salah satu benua yang memiliki beragam budaya, etnis dan agama tentu dapat menjadi medan konflik yang kompleks. Selain itu, konflik terkait etnis dan agama di kawasan ini dapat menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan dan mampu menciptakan tantangan besar bagi perdamaian dan stabilitas regional. Adapun konflik yang belakangan ini menyita perhatian publik tak hanya di satu negara saja namun seluruh dunia adalah konflik antar etnis dan agama di Myanmar atau yang masyarakat dunia menyebutnya konflik Rohingya.

Konflik antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar ini berlangsung cukup lama dan menjadi sumber penderitaan kemanusiaan yang mendalam. Masyarakat dengan etnis Rohingya yang beragama Islam mengalami deskriminasi sistemik dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar dan gerakan ekstrimis Budha. Bahkan perlakuan buruk yang diterima oleh etnis Rohingya tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) hingga menyita perhatian dunia.

Perlakuan pemerintah Myanmar yang semakin buruk membuat etnis Rohingya terpaksa harus mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Respon internasional terhadap konflik ini juga bervariasi. Beberapa negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengutuk keras dan menawarkan bantuan kemanusiaan, namun upaya diplomatik untuk menengahi konflik ini sering terhambat oleh politik internal Myanmar dan kompleksitas intervensi internasional.

Di Asia Tenggara, agama memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk dinamika sosial dan konflik antarindividu serta kelompok. Perbedaan agama seringkali memunculkan ketegangan, terutama ketika kelompok minoritas merasa terdeskriminasi oleh kelompok mayoritas. Dalam konteks ini, kosmopolitanisme menawarkan pendekatan yang lebih menekankan pada pentingnya membangun suatu hubungan yang harmonis antara berbagai kelompok dan mendukung nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Selain itu, pemikiran kosmopolitanisme dapat digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa setiap manusia dapat dilihat dari satu identitas tunggal dan tidak perlu melihat dari identitas lain seperti agama, ras, suku, bangsa bahkan kewarganegaraannya (Susanto, Windarto, and Harimurti 2017: 320).

Kata kosmopolitanisme seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang inklusif, universal dan menyeluruh. Kosmopolitanisme menjadi sebuah harapan masyarakat untuk hidup di dunia tanpa adanya perbatasan, dan kosmopolitanisme bersumber dari inspirasi pemikiran humanitas rasional, sebuah nilai yang terkandung dalam setiap manusia (Ariyadi 2019: 6). Hal tersebut sejalan dengan pandangan Hamka yang menyatakan bahwa kosmopolitanisme memiliki tujuan menjadikan manusia untuk berpikir, bertindak dan berlaku dengan cara yang lebih inklusif, lebih adil dan lebih pluralistik demi terciptanya perdamaian dunia (Aljunied 2018: 6).

Dalam rangka untuk mengatasi konflik yang terjadi tersebut, diperlukan berbagai pendekatan yang inklusif yang memperhitungkan dinamika lokal dan global. Jika pada umumnya kosmopolitanisme lebih cenderung dimaknai sebagai konsep elitis yang nilai-nilai dasarnya bersifat Barat seperti pemikiran Immanuel Kant atau Brown, maka Pnina

Webrner memiliki pandangan atau konsep baru yakni kosmopolitanisme vernakular. Konsep ini mencoba menunjukkan bahwa kosmopolitan tidak identik dengan Barat saja atau liberal-sekular saja, namun masyarakat non-Barat juga dapat bersikap toleran dan kosmopolitan dengan cara kosmopolitanisme vernakular yakni sikap terbuka terhadap segala perbedaan baik itu etnis, budaya, agama atau bangsa (Werbner 2017: 223). Pada intinya, kosmopolitanisme vernakular pemikiran webner merupakan konsep kosmopolitanisme yang dikemas dalam bahasa sehari-hari atau bahasa lokal seperti toleransi, keterbukaan, dan tanggung jawab.

Banyaknya konflik terkait etnis dan agama yang terjadi di Asia Tenggara menjadikan penulis tertarik untuk membahasnya. Selain itu, pentingnya merubah pandangan bahwa kosmopolitanisme tidak selalu mengacu pada konsep pemikiran Barat saja, namun masayarakat non-Barat juga memiliki konsep kosmopolitan vernakular yakni konsep kosmopolitan yang diterapkan secara lokal dengan bahasa sederhana yakni sikap terbuka terhadap segala perbedaan baik itu etnis, budaya, agama atau bangsa. Kosmopolitanisme vernakular Islam mengacu pada interpretasi lokal dari nilai-nilai kosmopolitanisme global dengan menekankan pada nilai-nilai universal Islam seperti toleransi, perdamaian, keadilan sosial, dan dialog antaragama. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kosmopolitanisme vernakular Indonesia dalam merespon konflik Rohingya di Myanmar.

Berbicara terkait kosmopolitanisme, ada beberapa penelitian yang bersinggungan dengan topik tersebut. Pertama, penelitian Pnina Werbner yang membahas tentang kosmopolitanisme vernakular sebagai disposisi etis: jaringan sufi, keramahtamahan, dan inklusivitas translokal (Werbner 2017). Fokus dalam penelitiannya tersebut adalah untuk menentang stereotip negatif tentang umat Islam yang dianggap intoleran dan eksklusif, dengan fokus pada kosmopolitanisme non-Barat yang bersifat lokal dan etis. Metode yang digunakan dalam penelitian Pnina meliputi penelitia etnografis di antara komunitas Sufi di Pakistan. Selain itu, Pnina menggunakan pendekatan teoritis yang menggabungkan ide-ide kosmopolitanisme dan etika toleransi untuk menentang stereotip tentang umat Islam. Dalam penelitiannya tersebut, Pnina menegaskan bahwa kosmopolitanisme vernakular juga diterapkan dalam praktik dan pemikiran masyarakat Muslim, selain dapat berperan sebagai agen toleransi, umat Islam juga memiliki keramahtamahan yang sejati. Konsep kosmolitanisme vernakular ala Pnina Werbner dijadikan sebagai acuan penulis untuk menganalisis respon Indonesia dalam konflik Rohingya di Myanmar. Kedua, penelitian Wildana Rahma yang membahas tentang dialog antaragama perspektif al-Qur'an dengan aktualisasi Islam kosmopolitan dalam meredam konflik agama di Indonesia (Rahma 2023). Dalam penelitian ini, Wildana berhasil menunjukkan bahwa dialog yang inklusif dan toleran dapat menjadi solusi efektif dalam meredam konflik. Selain itu, mengedepankan nilai-nilai Islam kosmopolitan yang menekankan pluralisme dan humanisme juga dapat meredamkan konflik yang terjadi. Kajian ini fokus pada bagaimana Islam kosmopolitan dapat diaktualisasikan dalam meredam konflik agama di Indonesia, sementara dalam penelitian ini penulis menggunakan kosmopolitanisme vernakular untuk menganalisis bagaimana respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep kosmopolitanisme vernakular dari Pnina Werbner, yang menyoroti bagaimana nilai-nilai universal khususnya dalam konteks agama Islam dapat diinterpretasikan atau diterapkan secara lokal. Penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memahami respons Indonesia terhadap konflik Rohingya. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan khazanah intelektual dalam upaya penerapan kosmopolitanisme vernakular untuk meredam konflik terkait agama.

## KERANGKA TEORI

### Kosmopolitanisme Islam

Definisi terkait kosmopolitanisme dalam pandangan beberapa peneliti memiliki ekspresi yang beragam. Akan tetapi, terdapat kesepakatan bahwa kosmopolitanisme

ditujukan sebagai satu pandangan global untuk merespon adanya kemajemukan sosial dalam suatu komunitas (Prastyo 2022: 5). Hal ini disetujui mengingat setiap manusia selalu berada dalam lingkup komunitas lokal dan global yang mengharuskan mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain. Dalam kondisi tersebut muncullah suatu keberagaman agama, budaya, etnis, suku, ras dan lainnya. Keberagaman itulah yang seharusnya dijadikan sebagai kekuatan bukan sebagai resistensi ataupun penghalang. Dapat dikatakan bahwa dalam hal ini kosmopolitanisme dimaknai sebagai pandangan yang selalu mengedepankan kemajemukan sosial sebagai kekuatan bersama untuk mencapai perdamaian global. Sederhananya, Kosmopolitanisme didefinisikan sebagai tindakan menghargai setiap perbedaan baik itu etnis, ras, maupun agama dan menghormati kelompok minoritas di sekitarnya (Abu Bakar and Shuki 2020: 790).

Berkaitan dengan kosmopolitanisme, Immanuel Kant dalam bukunya yang berjudul "*Practical Philosophy*" menyatakan bahwa syarat-syarat bagi keramahtamahan universal (*conditions of universal hospitality*) adalah hak seseorang untuk diterima, diperlakukan secara manusiawi dimana pun berada tanpa adanya kebencian, fobia dan juga permusuhan. Dalam hal ini konsep keramahtamahan diartikan sebagai hak orang asing atau kaum minoritas untuk tidak diperlakukan dengan buruk. Selain itu, Immanuel Kant menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki hak paling besar dibandingkan hak orang lain. Masing-masing individu memiliki hak yang sama untuk tinggal dan hidup di satu bumi. Karena bumi merupakan satu globe maka manusia tidak dapat terpisahkan satu sama lain ke tempat yang terhingga dan harus saling memegang rasa satu sama lainnya (Kant 1999: 328). Dalam perlindungan hak, kosmopolitanisme dimaknai sebagai sebuah teori normatif yang di dalamnya mengedepankan atau mengutamakan prinsip-prinsip keadilan. Kosmopolitanisme ini ditujukan untuk emansipasi manusia dari ketidakadilan maupun kesewenang-wenangan dalam berbagai hal seperti perbedaan agama, ras, suku, budaya maupun hal lainnya yang berbeda (Pujiriyani 2021: 242-243).

Dalam pandangan Gus Dur, kosmopolitanisme Islam telah ada sejak awal munculnya Islam itu sendiri. Dimulai dari Nabi Muhammad bersama para sahabatnya yang hijrah ke Madinah. Pada saat itu Nabi Muhammad memutuskan untuk meninggalkan kota Makkah karena Nabi Muhammad beserta umat Islam mengalami tekanan yang sangat hebat dan intimidasi dari penduduk Makkah. Di Madinah Nabi Muhammad membuat persaudaraan antar umat Islam yakni dengan menciptakan Piagam Madinah dengan tujuan untuk membangun harmoni sosial dengan seluruh umat meskipun berbeda suku dan agama (Siswanto and Fakhruddin 2022: 4). Dapat dilihat bahwa kosmopolitanisme sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad.

Menurut Gus Dus, kosmopolitanisme Islam dapat mencapai puncaknya ketika semua orang di muka bumi ini memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pikiran-pikirannya (Habibullah 2019: 21). Lebih dalam lagi, Kosmopolitaisme Islam dilandaskan pada cerminan Islam yang menunjukkan betapa luas serta matangnya sebuah pengetahuan dan pemikiran seseorang terkait keIslamannya. Keluasan dan kematangan seseorang dalam berfikir dapat dilihat dari seberapa terbuka cara pandangnya terhadap suatu hal dan bagaimana ia bersikap toleran, inklusif, moderat atau responsif terhadap setiap perkembangan zaman.

Secara garis besar, Gus Dur menjelaskan bahwa secara praksis konsep kosmopolitanisme mampu melenyapkan batas etnis, perbedaan agama, ras dan budaya yang dapat menjadi sebab munculnya perseteruan antara satu sama lain. Konsep kosmopolitanisme ini mencakup ajaran-ajaran umum kemanusiaan, keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kesetaraan dan persaudaraan yang dilandasi oleh ketauhidan (Samsudin and Nurbaya 2022: 61). Konsep kosmopolitanisme inilah yang nantinya dapat menghilangkan sikap intoleran atau bahkan rasisme terhadap kelompok minoritas atau orang asing.

*The Stanford Encyclopedia of Philosophy* mengidentifikasi kosmopolitanisme menjadi empat bentuk yakni; (1) kosmopolitanisme moral yang menggambarkan bahwa

identitas manusia lebih diutamakan daripada identitas kelompok seperti kebangsaan, ras, dan etnis, (2) kosmopolitanisme politik yang berfokus pada gagasan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan bahwa ada terdapat tanggungjawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian global, (3) kosmopolitanisme budaya yang mengacu pada gagasan bahwa terdapat nilai-nilai universal yang berlaku di seluruh budaya manusia karenanya perlu memahami keragaman budaya tersebut, (4) kosmopolitanisme ekonomi sebagai pandangan atau pendekatan yang menekankan integrasi ekonomi global dan kerjasama lintas batas sebagai cara untuk mencapai kesejahteraan bersama di seluruh dunia (Ritter 2023: 5-10).

Appiah (dalam Susanto et al. 2017) berpendapat bahwa di negara-negara pascakolonial, kosmopolitan menjadi salah satu argumen yang sering diutarakan jika membahas terkait kewarganegaraan, kesetaraan, hak-hak budaya dan supremasi hukum. Selain itu, Appiah (dalam Vidmar Horvat 2017: 4) juga menyatakan bahwa kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi memiliki tanggung jawab terhadap manusia lain, akan tetapi bukan suatu tanggung jawab yang berlebihan. Sehingga dapat dikatakan bahwa, tanggung jawab yang dimaksud oleh Appiah adalah sikap kepedulian terhadap orang lain atas hidupnya meskipun tidak ada hubungan apapun yang melatarbelakanginya.

Dapat disimpulkan bahwa pemikiran kosmopolitanisme Islam menekankan Islam bukanlah agama yang terkekang secara geografis atau budaya, tetapi merupakan sumber inspirasi universal yang dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh umat manusia bukan hanya umat Muslim saja. Hal ini tentu ketika kosmopolitanisme Islam diterapkan maka akan mendorong kolaborasi dan kerjasama antarbudaya untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil dan harmonis. Selain itu, kosmopolitanisme Islam juga dapat menjadi solusi paling solutif untuk terhindar dari adanya perselisihan ataupun ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan baik itu ras, agama, etnis maupun lainnya.

## Kosmopolitanisme Vernakular

Konsep kosmopolitanisme vernakular merupakan konsep baru dari kosmopolitan yang dikembangkan oleh Pnina Werbner. Konsep ini ditujukan untuk menentang konsep Brown bahwa kosmopolitan umum yang diterima memiliki akar-akar yang berkaitan dengan tradisi intelektual Barat dan liberal-sekular. Brown sepakat dengan Immanuel Kant yang menekankan bahwa pandangan kosmopolitanisme cenderung berasal dari pemikiran Barat yakni Eropa dan Amerika Utara yang di dalamnya mempromosikan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, demokrasi dan perdamaian dunia (Setiyaningsih 2022: 36).

Nilai-nilai kosmopolitanisme dalam pandangan Brown dan Kleingeld dipahami secara positif dan negatif. Secara positif, kosmopolitanisme dipahami sebagai sebuah kecenderungan positif akan keterbukaan pikiran, toleransi dan empati terhadap manusia. Secara negatif, kosmopolitanisme dipahami sebagai sebuah ide yang jiwa patriot dan nasionalismenya mulai memudar, serta tidak menunjukkan kesetiaannya terhadap negaranya (Susanto et al. 2017: 24). Konsep kosmopolitanisme dalam pandangan Brown ini didasarkan pada kontribusi dari filsuf-filsuf seperti Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum kosmopolitan dan perdamaian dunia sangat penting untuk terwujudnya moral universal.

Pnina Werbner tidak sepakat akan konsep Brown tersebut, ia menjelaskan bahwa masyarakat non-Barat juga dapat bersifat toleran dan kosmopolitan dengan cara kosmopolitanisme vernakular mereka yang melekat secara lokal dan budaya. Salah satu cara untuk mempromosikan kosmopolitanisme masyarakat non-Barat adalah dengan membuat lebih eksplisit istilah-istilah asli dan bahasa daerah yang mereka gunakan untuk mengekspresikan pandangan etis atau ideologi kosmopolitanisme mereka (Werbner 2017: 224). Dalam hal ini vernakular kosmopolitan dimaknai sebagai bentul-bentuk etika kosmopolitan alternatif, khususnya non-Barat yang mana didefinisikan

sebagai keterbukaan terhadap setiap perbedaan baik itu etnis, budaya, agama ataupun bangsa.

Kosmopolitanisme vernakular merupakan sebuah *oxymoron* yang tergabung dengan gagasan kontradiktif tentang spesifitas lokal dan pencerahan universal dan berusaha untuk mengkonseptualisasikan hal-hal yang berlawanan seperti patriotisme kosmopolitan, kosmopolitanisme yang mengakar, etnis kosmopolitan, kosmopolitanisme kelas pekerja, dan kosmopolitanisme yang berbeda. Gabungan tersebut muncul dalam tindakan mempertanyakan bentuk-bentuk kesadaran kosmopolitan dan perjalanan pascakolonial dan prakolonial. Secara lebih sederhana, konsep kosmopolitanisme vernakular merupakan pemahaman dan penerimaan terhadap perbedaan budaya yang berasal dari interaksi sosial sehari-hari yang bersifat rutin dan lintas batas etnis atau budaya dalam kehidupan sehari-hari (Huat 2020: 53).

Pnina Werbner mengembangkan konsep kosmopolitanisme vernakular menjadi suatu terobosan yang menekankan pada ciri individu dan komunitas yang mengintegrasikan nilai-nilai kosmopolitanisme dalam kehidupan sehari-hari tanpa mengorbankan identitas lokal dan kultural. Penting sekali untuk mempertahankan dan memperkaya identitas lokal dan kultural dalam konteks kosmopolitanisme. Hal tersebutlah yang membedakan antara kosmopolitanisme vernakular dengan kosmopolitanisme, di mana kosmopolitanisme cenderung mengabaikan atau menormalkan perbedaan budaya.

Kosmopolitanisme vernakular menekankan adaptasi kreatif terhadap pengaruh global. Misalnya, di era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dapat memudahkan individu untuk memperluas jaringan, menambah pengalaman dari orang lain dan mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu global. Hal tersebut tentu dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kehidupan sehari-hari dan juga dapat membuka pintu untuk berkontribusi pada solidaritas lintas budaya yang mana itu merupakan inti dari konsep Werbner. Melalui dialog yang terbuka dan penghormatan terhadap setiap perbedaan, individu dapat membangun sebuah hubungan yang kuat dan saling mendukung di antara komunitas yang berbeda. Solidaritas ini tidak hanya soal mengakui keberagaman budaya saja, namun juga terntang menghargai dan merayakan kekayaan yang ditawarkan oleh keanekaragaman dunia.

Pada intinya konsep kosmopolitanisme vernakular Pnina Werbner mencoba menawarkan pandangan yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kosmopolitanisme. Adanya kosmopolitanisme vernakular ini dapat memungkinkan integrasi yang lebih baik antara nilai-nilai universal dengan keanekaragaman budaya dan identitas lokal. Selain itu, kosmopolitanisme vernakular sebagai sebuah pandangan etis juga dapat mengeksplorasi ide-ide dan nilai-nilai yang tersebar melampaui batas dengan caranya sendiri (Werbner 2017: 239). Dapat dikatakan bahwa konsep ini cukup relevan dan penting dalam upaya membangun masyarakat global yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutkan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar melalui lensa kosmopolitanisme vernakular. Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan analisis literatur terkait dengan kosmopolitanisme Islam, vernakular kosmopolitanisme Islam, dan konflik Rohingya di Myanmar. Literatur yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi vernakular kosmopolitanisme Islam Indonesia dalam merespon konflik Rohingya di Myanmar. Studi kasus dipilih dari konteks yang bervariasi dalam hal geografis, demografi, dan sejarah konflik. Selain itu, konflik etnis Rohingya di Myanmar dipilih karena memiliki dampak yang besar tidak hanya dalam lingkup lokal saja namun juga global. Data primer akan dikumpulkan

melalui observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah untuk memahami kosmopolitanisme vernakular dalam konteks respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar. Pertama dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan topik utama dari data yang terkumpul terkait kosmopolitanisme vernakular. Selanjutnya, analisis naratif digunakan untuk memahami konflik Rohingya. Teknik *coding* digunakan untuk membantu mengorganisir data kualitatif ke dalam kategori relevan, sementara triangulasi data digunakan untuk memastikan keakuratan temuan dengan membandingakan hasil dari berbagai sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konflik Etnis Rohingya di Myanmar

Asia Tenggara merupakan salah satu benua dengan beragam etnis dan budaya di dalamnya. Keragaman tersebut selain menjadi sebuah kekayaan juga dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya suatu konflik dan ketegangan. Konflik tersebut bahkan tidak hanya menjadi perhatian dalam lingkup lokal saja, namun juga menjadi perhatian dunia atau global. Hal tersebut dikarenakan dampaknya yang besar, bahkan dapat mengganggu ketenangan negara lain. Salah satu konflik yang mampu menyita perhatian dunia baik itu lingkup lokal mapun global adalah konflik antar agama di Myanmar yang masyarakat dunia mengenalnya sebagai konflik Rohingya.

Myanmar merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan masyoritas penduduknya beragamakan Budha. Pada tahun 2022, Kemenlu Indonesia Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar mencatat bahwa dari 55,8 Juta Jiwa penduduk Myanmar terdapat 89,4% penduduk yang beragamakan Budha, Kristen Protestan dan Katolik 4,9%, Islam 3,9%, Animisme 1,2 %, Hindu 0,5% dan lainnya 0,1% (Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar). Dapat disimpulkan bahwa umat Muslim di Myanmar termasuk dalam kelompok minoritas. Etnis yang ada di Myanmar juga beragam dan terdapat delapan etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar. Delapan etnis tersebut ialah Burma, Kachin, Kayah, Karen, Chin, Mon, Rakhine, dan Shan. Di sisi lain, terdapat etnis Rohingya yang tidak diakui oleh pemerintah Myanmar dan etnis tersebut mayoritas memeluk agama Islam. Bahkan etnis Rohingya cenderung tidak dianggap sebagai warga negara Myanmar, namun sebagai pendatang *illegal* (Triono 2014: 6).

Konflik etnis dan agama di Myanmar mulai muncul ketika masyarakat dengan etnis ataupun agama minoritas mendapatkan perlakuan yang tidak sama bahkan cenderung dideskriminasi. Perbedaan agama, bahasa, identitas etnis dan ciri fisik menjadikan penduduk dengan etnis Rohingya mengalami intoleransi bahkan tidak dianggap sebagai warga negara resmi (Arianta, Mangku, and Yuliartini 2020: 168-169). Tak hanya itu, ruang gerak etnis Rohingya juga sangat dibatasi oleh pemerintah. Etnis Rohingya hanya diperbolehkan untuk tinggal di wilayah Utara Rakhine saja dan tidak diperbolehkan berpergian ke wilayah lain di Myanmar. Ketika mereka hendak pergi ke daerah lain, mereka harus izin dan membayar terlebih dahulu.

Etnis Rohingya juga menjadi objek kekerasan, penindasan bahkan penganiayaan dari junta militer dan gerakan ekstrimis Budha Myanmar. Konflik-konflik akibat perbedaan etnis terus dialami etnis Rohingya mulai tahun 2012 hingga saat ini. Bahkan konflik tersebut telah memakan banyak korban dan kerugian yang besar bagi etnis Rohingya. Program *ethnic cleansing* dari pemerintah Myanmar membuat pemukiman tempat etnis Rohingya tinggal menjadi rata oleh tanah. Selain itu, pemerintah Myanmar juga mengeluarkan kebijakan yang membatasi hak etnis Rohingya untuk menikah.

Konflik antara etnis Rohingya dengan Rakhine sebenarnya sudah terjadi sejak lama, akan tetapi pada tahun 2012 konflik tersebut kembali mencuat dan menyita perhatian dunia internasional. Ketegangan antara etnis Rohingya dengan Rakhine semakin parah ketika terjadi pembunuhan seorang wanita berumur 27 tahun yang diduga dilakukan oleh 3 orang pemuda Rohingya (Zalmatin and Syukur 2023: 563). Hal

DOI: https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2481

tersebut menyulut amarah para Biksu dan masyarakat etnis Rakhine sehingga mereka membunuh masyarakat etnis Rohingya dan merusak tempat ibadah etnis Rohingya. Peristiwa tersebut mengakibatkan 140 ribu masyarakat etnis Rohingya terusir, 5.338 bangunan rusak dan hampir 75.000 orang kehilangan tempat tinggal (Merici Siba and Nurul Qomari'ah 2018: 377).

Tak hanya itu, di tahun 2017 konflik Rohingya juga mencapai puncaknya yang menyebabkan banyak sekali kerusakan di Myanmar. Dalam konflik ini terjadi serangan militer Myanmar terhadap kelompok Muslim Rohingya di Rakhine. Serangan tersebut sangat membabi buta hingga melakukan pembakaran desa, pemerkosaan, dan pembunuhan masal terhadap etnis Rohingya. Tragedi ini mendapatkan perhatian internasional sebab mengakibatkan puluhan ribu orang tewas dan lebih dari 313.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara Bangladesh untuk mencari perlindungan (Amin 2018: 62).

Dapat dikatakan bahwa masyarakat dengan etnis Rohingya yang beragamakan Islam mendapatkan perlakuan yang sangat buruk baik dari sesama penduduk Myanmar yang beragamakan Budha maupun pemerintah Myanmar itu sendiri. Tak hanya itu, perlakuan buruk yang diterima oleh masyarakat etnis Rohingya di Myanmar sudah termasuk dalam pelanggaran HAM (hak asasi manusia). Konflik etnis Rohingya yang terjadi di Myanmar ini mendapatkan perhatian dunia ketika penduduk etnis Rohingya tersebut mengungsi ke negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Bangladesh (Budaya 2017: 108).

Salah satu negara yang menjadi tempat tujuan utama etnis Rohingya bermigrasi adalah Bangladesh, hal ini dikarenakan Bangladesh memiliki kesamaan budaya dan fisik dengan masyarakat etnis Rohingya. Perpindahan masyarakat etnis Rohingya ke Bangladesh terjadi dalam tiga periode. Periode pertama dimulai sejak tahun 1948 ketika Myanmar merdeka. Periode kedua terjadi pada tahun 1978 ketika terjadi represi negara kurang lebih 200 ribu masyarakat etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Periode ketiga terjadi pada tahun 1991/1992 di mana pada saat itu terdapat 250 ribu masyarakat etnis Rohingya bermigrasi ke Bangladesh. Pada awalnya pemerintah Bangladesh menganggap masyarakat etnis Rohingya tersebut sebagai migrasi yang mencari suaka, namun ketika jumlahnya semakin besar pemerintah Bangladesh mulai menganggap masyarakat etnis Rohingya yang datang ke Bangladesh tersebut sebagai pengungsi yang kemudian ditampung di tenda-tenda pengungsi (Alfiyah 2018: 48).

Selain negara Bangladesh, negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang dijadikan tempat pelarian masyarakat etnis Rohingya yang merasa tidak mampu bertahan di negara asalnya yakni Myanmar. Di tahun 2016, SUAKA melaporkan bahwa terdapat sekitar 2041 pengungsi Rohingya di Makasar dan di tahun 2023 Indonesia kembali didatangi oleh pengungsi Rohingya dari Myanmar dengan jumlah yang cukup banyak. Pemerintah negara Indonesia sendiri telah berupaya memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pengungsi Rohingya, meskipun dalam pelaksanaannya tersebut pemerintah Indonesia juga banyak mengalami kendala. Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk beragamakan Islam terbesar di dunia tentu memiliki peran yang penting dalam merespon pelanggaran HAM di Myanmar (Wahyudi and Niko 2023: 112).

## Respon Indonesia terhadap Konflik Rohingya di Myanmar dalam Perspektif Kosmopolitanisme Vernakular

Beragamnya etnis dan agama yang ada di Asia Tenggara menjadikan konflik antara satu dengan lainnya rawan untuk terjadi. Seperti halnya yang terjadi di Myanmar yakni konflik Etnis Rohingya. Konflik tersebut menjadi sangat menarik untuk dibahas karena terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama bahkan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Tak hanya itu, konflik antar agama dan etnis tersebut juga telah menjadi perhatian masyarakat baik dalam tingkat lokal maupun global sehingga menjadi salah satu agenda pembahasan tahunan oleh OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Salah satu penyebab dari munculnya konflik etnis maupun agama yakni sikap intoleran baik dari masyarakat maupun pemerintah. Dalam rangka membangun kondisi yang damai dalam keberagaman etnis dan agama tentu harus diawali dengan sikap toleransi yang tinggi terhadap perbedaan yang ada dan menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Hak yang sama dalam hal ini meliputi hak untuk diakui, dihormati, dan dilindungi tanpa adanya deskriminasi berdasarkan etnis, agama atau latar belakang kehidupannya.

Konflik Rohingya di Myanmar merupakan salah satu konflik yang mampu menyita perhatian pubik. Hal tersebut terjadi karena konflik ini telah memakan banyak sekali korban dan banyak sekali kerusakan. Tak hanya itu, konflik tersebut juga berdampak bagi negara-negara terdekat Myanmar karena masyarakat etnis Rohingya yang mendapatkan deskriminasi bahkan kekerasan dari pemerintah Myanmar memilih kabur dan mengungsi di negara terdekat. Adapun negara yang menjadi tujuan tempat pengungsian Rohingya adalah negara Bangladesh, Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang dijadikan tempat tujuan dari etnis Rohingya untuk melarikan diri dari kekejaman pemerintah Myanmar telah menunjukkan kepeduliannya untuk memberi pertolongan. Dalam hal ini, konsep kosmopolitanisme vernakular dari negara Indonesia telah diterapkan untuk merespon konflik Rohingya di Myanmar. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana nilai-nilai Islam yang universal diadopsi dan diinterpretasikan dalam konteks lokal serta tetap mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya yang ada.

Indonesia tergabung dalam organisasi internasional baik itu PBB, OKI, maupun ASEAN telah berupaya untuk membantu meredam konflik Rohingya di Myanmar. Dalam hal ini Indonesia berperan sebagai inisiator dan fasilitator pendesak negara-negara lain yang tergabung dalam OKI untuk ikut serta dalam upaya menyelesaikan konflik Rohingya di Myanmar. Negara Indonesia menggunakan berbagai pendekatan diplomasi untuk menyelesaikan permasalaahan ini. Adapun pendekatan diplomasi yang dilakukan Indonesia adalah diplomasi pada level formal *G to G (Government to Government)* baik itu antara pemerintah Myanmar dengan Indonesia, antara OKI dengan Indonesia maupun lewat jalur kemanusiaan (Sundari, Prayuda, and Venita Sary 2021: 185).

Di tengah meningkatnya konflik antar etnis yang terjadi di Myanmar, OKI dapat mengambil peran penting dalam mendorong kebijakan yang lebih mengedepankan hak asasi manusia dan melindungi kelompok minoritas di Myanmar. Melalui advokasi aktif, OKI dapat menyuarakan keprihatinan global atas perlakuan buruk yang terjadi pada etnis Rohingya, menggalang dukungan dari negara-negara Muslim yang tergabung dalam OKI dan mengupayakan bantuan kemanusiaan yang lebih besar. PBB sebagai forum Global juga memiliki peran yang sama penting seperti OKI. PBB memiliki wewenang untuk menegakkan hukum internasional dan mendesak Myanmar untuk mematuhi standar hak asasi manusia. PBB dapat mengeluarkan resolusi yang mengutuk keras atas pelanggaran HAM yang terjadi pada etnis Rohingya melalui Dewan Keamanan atau Dewan Hak Asasi Manusia.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah menunjukkan respon positif dalam penyelesaian konflik Rohingya di Myanmar. Indonesia sebagai negara dengan pluralitas etnis, agama, dan budaya yang sangat kental juga beragam telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip kosmopolitanisme dalam menanggapi konflik Rohingya di Myanmar. Adapun respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar dalam konteks kosmopolitanisme vernakular antara lain adalah;

### *Bantuan Kemanusiaan*

Indonesia secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya. Adapaun bantuan kemanusiaan tersebut seperti pengiriman makanan, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan terhadap penderitaan di luar batas sendiri. Bantuan kemanusiaan yang lakukan oleh negara Indonesia termasuk dalam gotong

DOI: https://doi.org/10.18784/smart.v10i2.2481

royong, di mana itu merupakan budaya lokal Indonesia. di Indonesia budaya gotong royong telah menjadi tradisi yang hingga saat ini masih konsisten dilakukan ketika dibutuhkan.

Dalam hal ini, tak sedikit masyarakat Indonesia bergotong-royong dalam mengumpulkan dana untuk membantu pengungsi Rohingya baik itu untuk pemenuhan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Bahkan pemerintah Indonesia telah menyiapkan tempat untuk para pengungsi Rohingya. Hal ini merupakan salah satu pentuk kepedulian terhadap sesama manusia.

Selain itu, Indonesia telah secara terbuka menerima kedatangan para pengungsi Rohingya sejak 20 Mei 2015. Bahkan data UNHCR menyatakan pada tahun 2016 tercatat lebih dari 1000 pengungsi Rohingya yang tinggal di Indonesia. Terakhir tahun 2021 Indonesia kembali didatangi oleh ratusan pengungsi Rohingya yang berlabuh di Aceh. Dapat dikatakan bahwa Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mengizinkan kapal pengungsi Rohingya untuk masuk ke daerah teritorial. Tidak hanya pengungsi Rohingya saja, bahkan Indonesia masih menerima pengungsi dari berbagai latar belakang dan negara (Indradipradana and Haridha 2023: 214). Hal ini menunjukkan sikap keterbukaan Indonesia terhadap sesama manusia. Sikap keterbukaan tersebut merupakan penyederhanaan bahasa kosmopolitanisme.

Ini merupakan salah satu bentuk kosmopolitanisme vernakular, meskipun memiliki banyak perbedaan seperti budaya, bangsa atau negara bahkan agama tidak mengurangi rasa empati Indonesia untuk membantu pengungsi Rohingya. Dapat dilihat bagaimana masyarakat Indonesia bergotong-royong mengumpulkan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan pengungsi Rohingya dan bagaiamana Indonesia dapat bersikap terbuka terhadap pengungsi Rohingya yang datang merupakan salah satu wujud dari pengimplementasian konsep kosmopolitanisme vernakular. Bahasa kosmopolitanisme yang semula cenderung ke pemikiran Barat dibungkus dalam bahasa sehari-hari yang tercermin dalam sikap simpati, toleran, terbuka dan tanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan meskipun berbeda dalam banyak hal.

### *Diplomasi Regional*

Indonesia yang tergabung dalam organisasi internasional seperti PBB, OKI, dan ASEAN telah berupaya untuk membantu meredam konflik Rohingya di Myanmar. Indonesia berperan sebagai mediator dan fasilitator dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik melalui partisipasi aktif dalam ASEAN dan forum-forum regional lainnya (Azizah 2017: 169). Usaha Indonesia dalam hal ini menunjukkan upaya untuk mempromosikan perdamaian dan penyelesaian konflik secara diplomatis, sesuai dengan prinsip-prinsip kosmopolitanisme yang mendorong kerjasama internasional untuk kepentingan bersama.

Konsep kosmopolitanisme vernakular dalam hal ini dapat dilihat dari bagaimana upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik Rohingya di Myanmar dengan diplomasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi diplomasi damai. Hal ini dilakukan sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia aktif terlibat dalam diplomasi multilateral dan berbagai inisiatif perdamaian internasional. Pada masa itu, Indonesia memiliki peran penting dalam konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 yang menegaskan komitmen negara-negara berkembang untuk kerja sama yang damai dan keadilan global (Rosyidin 2023: 139). Respon Indonesia dalam konflik Rohingya di Myanmar ditunjukkan pada bagaimana lantangnya Indonesia dalam mengadvokasi hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Hal tersebut dilakukan dalam pertemuan berbagai negara ASEAN.

Dalam bahasa lokal, diksi diplomasi erat kaitannya dengan musyawarah mufakat. Indonesia secara tegas menggarisbawahi bagaimana pentingnya menemukan solusi damai untuk mengakhiri kekerasan terhadap Rohingya dan memastikannya mendapatkan perlindungan. Hal ini berarti Indonesia menjunjung tinggi budaya

musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada seperti halnya konflik Rohingya di Myanmar.

Selama terjadinya konflik Rohingya di Myanmar ini, Indonesia telah berusaha dengan maksimal dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang melanda. Diplomasi Indonesia mengambil pendekatan yang berpusat pada menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mempromosikan perdamaian, dan mendesak pemerintah Myanmar untuk menghormati hak asasi manusia baik itu etnis Rohingya maupun etnis lainnya. Selain itu, Indonesia juga menggunakan diplomasi agama dengan memfasilitasi dialog antaragama untuk mempromosikan toleransi dan perdamaian. Setelah terjadinya dialog tersebut, diharapkan Myanmar dapat lebih membuka diri dan menunjukkan pertanggungjawabannya dalam memberikan perlindungan kepada semua warganya tanpa membeda-bedakan latar belakangnya baik itu etnis, agama maupun lainnya (Pujayanti 2018: 303). Dapat kita ketahui bahwa respon Indonesia dalam konflik Rohingya di Myanmar telah mencerminkan kosmopolitanisme vernakular dengan memahami dan memanfaatkan identitas agama sebagai aset dalam diplomasi.

Respon yang telah diberikan Indonesia dalam menangani konflik Rohingya membawa berbagai dampak baik itu positif maupun negatif. Dampak positif yang ditimbulkan antara lain adalah meningkatnya diplomasi regional yang dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin di ASEAN dan forum internasional, serta dapat meningkatkan kesadaran publik terkait isu hak asasi manusia. Pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Rohingya juga berdampak pada membaiknya citra Indonesia sebagai negara yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama manusia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan antara lain adalah munculnya tantangan politik domestik yang dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, terutama dalam konteks sentimen anti-imigran. Selain itu, alokasi sumber daya untuk bantuan Internasional juga seringkali dianggap sebagai pengalihan isu domestik yang sebenarnya penting untuk di selesaikan. Keterlibatan dalam konflik internasional juga dapat berpotensi memunculkan radikalisasi. Di balik dampak positif yang dirasakan oleh Indonesia akibat responsifnya terhadap sebuah konflik internasional ternyata perlu juga diperhatikan bahwa sikap tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi negaranya sendiri.

Dalam kesimpulannya, diplomasi regional Indonesia dalam merespon konflik Rohingya di Myanmar dari perspektif kosmopolitanisme vernakular menunjukkan komitmen untuk menggabungkan nilai-nilai lokal dengan niai-nilai universal dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan global. Dengan menggunakan pendekatan ini, Indonesia memegang peranan penting dalam membawa solusi terhadap krisis kemanusiaan yang kompleks di tingkat internasional seperti konflik Rohingya di Myanmar.

## PENUTUP

Konflik etnis dan agama rentan terjadi di Asia Tenggara karena beragamnya etnis dan agama di wilayah ini. Konflik agama dan etnis Rohingya di Myanmar mampu menjadi sorotan dunia. Sikap intoleran dari masyarakat dan pemerintah seringkali menjadi penyebab munculnya konflik. Untuk membangun damai dalam keberagaman etnis dan agama, penting bagi kita memiliki toleransi tinggi terhadap perbedaan dan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak yang sama. Konsep kosmopolitanisme seringkali dikenal sebagai konsep dari pemikiran Barat seperti Eropa dan Amerika Utara. Dalam konteks ini, Pnina Werbner memiliki konsep lain yakni kosmopolitanisme vernakular. Bahasa kosmopolitanisme dikemas dalam bahasa lokal atau sehari-hari seperti keterbukaan, toleransi, sikap saling mengerti dan tanggung jawab terhadap manusia lain.

Konsep kosmopolitanisme vernakular dapat dilihat dari bagaimana respon Indonesia terhadap konflik Rohingya di Myanmar. Adapun respon yang termasuk dalam kosmopolitanisme vernakular adalah pemberian bantuan kemanusiaan yang dilakukan

Indonesia kepada pengungsi Rohingya. Bagaimana Indonesia dalam bergotong royong mengumpulkan dana juga menyediakan kebutuhan hidup para pengungsi rohingya merupakan wujud dari rasa tanggung jawab dalam memanusiakan manusia. Selain itu, Indonesia menerima para pengungsi rohingya yang tentu memiliki latarbelakang yang berbeda dengan Indonesia. Ini merupakan sikap keterbukaan yang mencerminkan kosmopolitanisme vernakular. Di sisi lain, Indonesia memegang peranan penting dalam konflik Rohingya di Myanmar. Indonesia berperan sebagai fasilitator dan mediator untuk penanganan konflik ini. Berbagai macam diplomasi regional telah dilakukan Indonesia. Dalam bahasa lokal, diksi diplomasi erat kaitannya dengan musyawarah mufakat. Indonesia secara tegas menggarisbawahi bagaimana pentingnya menemukan solusi damai untuk mengakhiri kekerasan terhadap Rohingya dan memastikannya mendapatkan perlindungan. Hal ini berarti Indonesia menjunjung tinggi budaya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap konflik yang ada seperti halnya konflik Rohingya di Myanmar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek mengolah data dan menganalisis data, karenanya perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melengkapi kekurangan tersebut. Selain itu, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan data untuk memperkuat analisis penelitian sehingga peneliti tidak cukup untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kosmopolitanisme vernakular dalam meredam konflik agama. Namun terlepas dari hal tersebut, konsep kosmopolitanisme vernakular dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk meredam konflik terkait agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar, Mohd Syuhaidi, and Mohamad Syafiq Bin Mat Shuki. 2020. "Exploring the Depiction of Cosmopolitanism in Yasmin Ahmad's Movie: Talentime (2009)." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10(6):Pages 788-803. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v10-i6/7374.

Adi, Agus Satmoko. 2020. "Identitas Agama Islam yang Moderat di Indonesia sebagai Bagian dari Penguatan Indentitas Nasional." *JCMS* 5(02):1–5.

Ajawaila, Della Paula, Alynne Hermyn Matulapelwa, and Stevi Ngongare. 2022. "Peranan Indonesia Dalam Kasus Etnis Rohingya Berdasarkan Konsep Responsibility to Protect (R2P)." *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (JSSH)* 2(1):131–136. https://doi.org/10.52046/jssh.v2i1.1204.

Alfiyah, Nur Inna. 2018. "Peran Pemerintah Indonesia dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya." *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 3(2):43–52. https://doi.org/10.36636/dialektika.v3i2.153.

Aljunied, Khairudin. 2018. *Hamka and Islam: Cosmopolitan Reform in the Malay World*. London: Cornell University Press.

Amin, Mahfud Khoirul. 2018. "Konflik Rohingya: Akar Masalah, Penyelesain, dan Peran Indonesia." *Jisiera: the Journal of Islamic Studies and International Relations* 3(1). https://doi.org/10.5281/ZENODO.6790120.

Arianta, Ketut, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. 2020. "Perlindungan Hukum bagi Kaum Etnis Rohingya dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional." *Jurnal Komunitas Yustitia* 3(2):166-176. https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i2.28849.

Ariyadi. 2019. "Budaya Kosmopolitanisme dalam Praktik Jual Beli di Pasar Terapung pada Kalimantan Selatan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* 9(2):84–90. https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v9i2.2510.

Azizah, Indah Nur. 2017. "Peranan Indonesia dalam Membantu Penanganan Masalah Etnis Rohingya di Myanmar (2014-2017)." *Global Political Studies Journal* 1(2):162–180. https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i2.2022.

Budaya, Budi. 2017. "Dampak Kewarganegaraan Etnis Rohingnya Di Myanmar Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Negara Sekitar." *Jurnal Ilmiah Hukum* 11(1):106–120.

Habibullah, M. 2019. "Kosmopolitanisme dalam Budaya Islam." *As-Shuffah* 7(2):18–24. https://doi.org/10.19109/as.v1i2.4859.

Huat, Chua Beng. 2020. "Sacrificing Vernacular Cosmopolitanism for the Postcolonial Nation." *Situations* 13(1):51–74. https://doi.org/10.22958/situcs.2020.13.1.003.

Indradipradana, R. K., and Frieska Haridha. 2023. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022." *Indonesian Perspective* 8(2):211–236. https://doi.org/10.14710/ip.v8i2.59246.

Kant, Immanuel. 1999. *Practical Philosophy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Yangon Myanmar. n.d. "Profil Myanmar." Retrieved May 20, 2024 (https://kemlu.go.id/yangon/id/read/myanmar/1739/etc-menu).

Merici Siba, M. Angela, and Anggi Nurul Qomari'ah. 2018. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Konflik Rohingya Human Right Violations On Rohingya Conflict." *Journal of Islamic World and Politics* 2(2). https://doi.org/10.18196/jiwp.2221.

Prastyo, Angga Teguh. 2022. "Penerapan Nilai-Nilai Kosmopolitanisme Islam dalam Mencegah Radikalisme Agama pada Masyarakat Muslim Plateau Dieng." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 3(1):1–17. https://doi.org/10.53491/porosonim.v3i1.262.

Pujayanti, Adirini. 2018. "Interfaith Dialogue Indonesian Soft Power Diplomacy On Rohingya Issues." *KAJIAN* 23(4):295–309. https://doi.org/10.22212/kajian.v23i4.2117.

Pujiriyani, Dwi Wulan. 2021. "Etnisitas, Budaya Politik dan Realitas 'Ulun Lampung': Dominasi Diaspora Jawa dan Potensi Demokrasi Kosmopolitanisme di Lampung." *Jurnal Sosiologi Nusantara* 7(2):239–252. https://doi.org/10.33369/jsn.7.2.239-252.

Rahma, Wildana. 2023. "Dialog Antaragama Perspektif Al-Qur'an: Aktualisasi Islam Kosmopolitan dalam Meredam Konflik Agama di Indonesia." *Jurnal Moderasi: the Journal of Ushuluddin and Islamic Thought, and Muslim Societies* 3(2): 72-91.

Ritter, Carl. 2023. "Understanding Cosmopolitanism: A Morphological Approach." *Journal of Political Ideologies* Vol. 1(01):1–20. https://doi.org/10.1080/13569317.2023.2275040.

Rosyidin, Mohamad. 2023. "Pragmatisme Multilateral dalam Momen Keketuaan Indonesia di G20 dan ASEAN, 2022-2023." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional* 14(2):131–152. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4123.

Samsudin, and Siti Nurbaya. 2022. "Konsep Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Islam Kosmopolitan." *FiTUA: Jurnal Studi Islam* 3(1):56–66. https://doi.org/10.47625/fitua.v3i1.371.

Setiyaningsih, Dewi. 2022. "Demokrasi Radikal Sebagai Alternatif Tatanan Politik Global dalam Konteks Multikulturalisme." *POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik* 14(1):32–41.

Siswanto, M., and M. Anas Fakhruddin. 2022. "Islam Kosmopolitan Gus Dur dalam Konteks Sosio-Keagamaan di Indonesia." *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 1(01).

Sundari, Rio, Rendi Prayuda, and Dian Venita Sary. 2021. "Upaya Diplomasi Pemerintah Indonesia Dalam Mediasi Konflik Kemanusiaan Di Myanmar." *Jurnal Niara* 14(1):177–187. https://doi.org/10.31849/niara.v14i1.6011.

Susanto, Budi, A. Windarto, and A. Harimurti. 2017. "Imagined (Cosmopolitan) Communities." in *On Reviving Benedict Ardeson*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

Triono. 2014. "Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya." *Jurnal TAPIs* 10(2).

Vidmar Horvat, Ksenija. 2017. "Cosmopolitan Patriotism." Pp. 1–14 in *Handbook of Patriotism*, edited by M. Sardoc. Cham: Springer International Publishing.

Wahyudi, Herry, and Nikodemus Niko. 2023. "Menggagas Diplomasi Demokrasi Muslim: Upaya Indonesia Dalam Menghadapi Pelanggaran HAM Di Myanmar." *Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam* 6(1):107–135. https://doi.org/10.21043/politea.v6i1.20350.

Werbner, Pnina. 2017. "Vernacular Cosmopolitanism as an Ethical Disposition: Sufi Networks, Hospitality, and Translocal Inclusivity" edited by L. Buskens and A. Van Sandwijk. *Islamic Studies in the Twenty-First Century* 223–40. https://doi.org/10.1017/9789048528189.012.

Zalmatin, Wa Ode, and Syamzan Syukur. 2023. "Konflik Rohingya dan Pengakuan Kewarganegaraannya." *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6(2):558–568.